

**PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP PENANGANAN GELANDANGAN DAN
PENGEMIS PASCA PENERTIBAN DI KOTA PEKANBARU**

Oleh :

Erfan Setiawan*

Email : erfan.setiawan@rocketmail.com

Pembimbing : Dr. H. Zaili Rusli, Msi.

Bibliografi : 8 jurnal, 22 buku, 25 situs internet

Jurusan Ilmu Administrasi Negara – Prodi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya KM. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293-
Telp/Fax(0761) 63277

ABSTRACT

Handling is better done by the Department of Social and Pekanbaru City Cemetery to the provision of rehabilitation, providing guidance in the form of mental health counseling, as well as religious guidance. Once the guidance is done, then to every homeless and beggars can be given for the provision of basic skills training, skills which will be used when they are released back into normal society.

The purpose of this study is to see how the implementation of the principles of handling vagrants and beggars in the city pekanbaru and to know which one is the dominant factor in this study. To see what factors are the bottlenecks in the implementation of the principles of handling vagrants and beggars in the city of Pekanbaru researchers saw from Gibson's theory (2007). This research was conducted in the social services and burial city of Pekanbaru. In conducting the data collection methods used observation and in-depth interviews to research informants. Once the data is collected and then drawn conclusions based on the laws of inference and analyzed using qualitative descriptive analysis.

After a study found that the factors that become barriers to the implementation of the principles of handling vagrants and beggars in the city of Pekanbaru is among other factors the absence of shelter or rehabilitation center, the lack of government funding, social services employees who do not have the understanding and expertise in implementing the principle of The treatment principles, and the ineffectiveness of regulation ni 12 of 2008 on the social order in the city of Pekanbaru.

Keywords: implementation, management principles, vagrants and beggars.

*Mahasiswa Jurusan Administrasi Negara Angkatan 2007

Gelandangan dan pengemis secara normal adalah suatu kehidupan manusia yang seutuhnya termasuk masyarakat yang tidak berdaya, lemah, terasing, kurang mendapat tempat dalam tata pergaulan masyarakat kelompok berpenyakit sosial. Faktor penyebab dari gepeng (gelandangan dan pengemis) adalah Masalah sosial yang tidak bisa dihindari keberadaanya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada di daerah perkotaan yaitu masalah gelandangan dan pengemis. Permasalahan sosial gelandangan dan pengemis merupakan akumulasi dan interaksi dari berbagai permasalahan seperti hal-hal kemiskinan, pendidikan rendah, minimnya keterampilan kerja yang di miliki, lingkungan, sosial budaya, kesehatan dan lain sebagainya. Adapun gambaran permasalahan tersebut menurut Junaidi (2007) yaitu sebagai berikut :

1. Masalah kemiskinan.

kemiskinan menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan menjangkau pelayanan umum sehingga tidak dapat Mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak.

2. Masalah Pendidikan

Pada umumnya tingkat pendidikan gelandangan dan pengemis relatif rendah sehingga menjadi kendala untuk memperoleh pekerjaan yang layak

3. Masalah keterampilan kerja

Pada umumnya gelandangan dan pengemis tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja.

4. Masalah sosial budaya

Ada beberapa faktor sosial budaya yang mengakibatkan seseorang menjadi gelandangan dan pengemis adalah sebagai berikut :

- a. Rendahnya harga diri.
Rendahnya harga diri kepada sekelompok orang, mengakibatkan tidak dimiliki rasa bahu untuk minta minta.
- b. Sikap pasrah pada nasib.
Mereka menganggap bahwa kemiskinan adalah kondisi mereka sebagai gelandangan dan pengemis adalah nasib, sehingga tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan.
- c. Kebebasan dan kesenangan hidup mengelandang
Ada kenikmatan tersendiri bagi orang yang hidup mengelandang

Makin meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis di Pekanbaru menyebabkan masalah sosial. Pekerjaan yang mereka lakukan bermacam-macam, mulai dari pemulung, pengemis, kernet angkutan umum, tukang lap kaca mobil, tukang semir sepatu, jualan koran, dan masih banyak pekerjaan lain yang terpaksa harus mereka lakukan dengan tujuan bisa makan. Salah satu solusi yang sering dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Sosial dan Pemakaman yang bekerjasama dengan Satpol PP adalah dengan melakukan razia. Sebenarnya razia yang dilakukan ini tidak dapat menyelesaikan permasalahan

menyangkut gelandangan dan pengemis tersebut. Akibat seringnya terkena razia (penjaringan) menyebabkan beberapa gelandangan dan pengemis dengan terpaksa harus berhenti dari pekerjaan yang dilakukannya. Dan ketika hal ini berlangsung lama, sementara gelandangan dan pengemis harus tetap memenuhi kebutuhan makan untuk tetap hidup, maka tak jarang pilihan terakhir dari gelandangan dan pengemis adalah dengan melakukan tindak kriminal. Tak jarang beberapa gelandangan dan pengemis terpaksa harus menjadi pencopet dan maling hanya untuk mencari uang makan.

gelandangan dan pengemis yang berhasil dirazia (terjaring) tidak mendapatkan penanganan sesuai dengan Prinsip-prinsip penanganan gelandangan dan pengemis menurut Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008. Bahkan hanya sebagian kecil dari gelandangan dan pengemis yang berhasil ditangani serta mendapatkan keterampilan untuk dilepas ke tengah masyarakat normal. , kesenjangan ini terjadi karena dinas sosial hanya mendata dan melaksanakan prinsip kesadaran diri, dimana pembinaan hanya ditawarkan ke gelandangan dan pengemis yang mau di bina, sisanya di pulangkan ke daerah asal dan selebihnya hanya di lepas begitu saja dengan membuat surat pernyataan tidak akan menggelandang dan mengemis lagi, dapat dilihat disini ketidak tegasan dinas sosial dalam melaksanakan prinsip-prinsip penanganan gelandangan dan pengemis.

Hal itu juga yang menyebabkan gelandangan dan pengemis kembali lagi menggelandang dan mengemis, karena mereka sudah terlalu menikmati profesi menggelandang dan mengemis dan juga hal keterampilan yang di dapat dari hasil pembinaan dinas social dan pemukiman kota pekanbaru tidak maksimal, serta factor tingkat memberi masyarakat yang terlalu tinggi menyebabkan juga kenapa mereka kembali lagi ke jalan setelah di razia dan di bina oleh dinas social dan pemukiman kota pekanbaru.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 dalam Bab VII Pasal ke-7 telah mengatur mengenai prinsip-prinsip penanganan gelandangan dan pengemis di Pekanbaru, yang mana bunyinya adalah sebagai berikut :

Prinsip-prinsip dalam penanganan gelandangan dan pengemis :

1. Prinsip penerimaan gelandangan dan pengemis secara apa adanya.
2. Prinsip tidak menghakimi (*Non Judgemental*) gelandangan dan pengemis.
3. Prinsip individualisme, dimana setiap gelandangan dan pengemis tidak disama ratakan begitu saja, tetapi harus dipahami secara khusus sesuai dengan keunikan pribadi dan masalah mereka masing-masing.
4. Prinsip kerahasiaan, dimana setiap informasi yang diperoleh dari gelandangan dan pengemis dapat dijaga kerahasiaannya sebaik mungkin, terkecuali digunakan

untuk kepentingan pelayanan dan rehabilitasi social gelandangan dan pengemis itu sendiri.

5. Prinsip partisipasi, dimana gelandangan dan pengemis beserta orang-orang terdekat dengan dirinya diikuti sertakan dan dapat berperan optimal dalam upaya pelayanan dan rehabilitasinya kembali ke masyarakat.
6. Prinsip komunikasi, dimana kualitas dan intensitas komunikasi antara gelandangan dan pengemis dengan keluarga dan lingkungan sosialnya dapat ditingkatkan seoptimal mungkin sehingga berdampak positif terhadap upaya rehabilitasi gelandangan dan pengemis.
7. Prinsip kesadaran diri, dimana para pelaksana pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis secara sadar wajib menjaga kualitas hubungan profesionalnya dengan gelandangan dan pengemis, sehingga tidak jatuh dalam hubungan emosional yang menyulitkan dan menghambat keberhasilan pelayanan.

Berdasarkan peraturan tersebut diatas, Dinas Sosial dan Pemakaman yang bekerjasama dengan Satpol PP harus memegang ketujuh prinsip penanganan gelandangan dan pengemis jika memang serius ingin menyelesaikan permasalahan gelandangan dan pengemis yang ada di Pekanbaru. Dinas Sosial dan Pemakaman yang bekerjasama dengan Satpol PP perlu mendata lebih lanjut

permasalahan ataupun alasan-alasan setiap gelandangan dan pengemis menyangkut mengapa ia lebih memilih hidup di jalan daripada kembali kelingkungan masyarakat normal untuk selanjutnya dicarikan solusi masalahnya, dengan harapan ketika permasalahan sigelandangan dan pengemis tersebut sudah teratasi, maka ia akan kembali kekehidupan normal.

Dengan melihat latar belakang demikian penulis tertarik untuk dapat mengetahui bagaimana kinerja dinas social dan pemakaman kota pekan baru dalam penanganan gelandangan dan pengemis. Sehingga penulis akan mengambil judul penelitian dengan judul "**Pelaksanaan Prinsip-prinsip Penanganan Gelandangan dan Pengemis Pasca Penertiban di Kota Pekanbaru**".

Pelaksanaan peraturan daerah yang efektif adalah apabila peraturan tersebut dapat mencapai tujuannya. **The Liang Gie (2000:24)** mengemukakan efektivitas adalah keadaan atau kemampuan suatu kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan guna yang diharapkan. **Handoko dalam Sofyan (2010)** mengatakan bahwa merupakan kemampuan memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, atau bisa dikatakan seseorang dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau cara yang tepat untuk mencapai tujuan.

Menurut **Sumaryadi (2005:105)** efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh

mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu tenaga dan yang lain.

Menurut **Ducuan yang dikutip dari Adam (2000:229)** yang dikenal dengan ” *Multiple*” mengatakan bahwa pengukuran efektivitas organisasi sesungguhnya harus mencakup berbagai kriteria. Seperti efektivitas kemampuan penyesuaian diri dengan tuntutan perubahan adaptasi, integrasi, motivasi dan produktivitas

Ukuran efektivitas yang unvariasi, dikemukakan oleh **Campbell dalam Sumaryadi (2005)** yaitu: kualitas, produktivitas, kesiagaan, efisiensi, laba atau penghasilan, pertumbuhan, pemanfaatan lingkungan, stabilitas, perputaran atau keluar masuk pekerja, kemangkiran, kecelakaan, semangat kerja, motivasi, kepuasan, penerimaan tujuan-organisasi, kepaduan konflik-konflik kompak, keluwesan-adaptasi, penilaian oleh pihak luar.

Gibson dalam As'ari (2007) mengatakan bahwa efektivitas organisasi dapat diukur yaitu kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaiannya tujuan, proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, ketersediaan prasarana dan sarana, dan sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Gibson menambahkan beberapa kriteria efektivitas, yaitu

kriteria jangka pendek-produksi, mutu, efisiensi, fleksibilitas dan kepuasan, pengembangan, kriteria jangka menengah-persaingan dan kriteria jangka panjang-kelangsungan hidup. Berkaitan dengan kriteria tersebut menjelaskan bahwa:

1. Produksi atau produktivitas, mencerminkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan sejumlah barang dan jasa seperti yang dituntut oleh lingkungan.
2. Mutu/Kualitas, produk yang memenuhi harapan pelanggan dan klien untuk kinerja produk dan jasa, dengan ukuran dan penilaian mutu berasal dari pelanggan dan masyarakat.
3. Efisiensi diartikan sebagai rasio keluaran dibandingkan masukan, memfokuskan pada siklus, masukan – proses – keluaran, dan bahkan menekankan pada elemen masukan dan proses.
4. Fleksibilitas menyangkut kemampuan organisasi untuk mengalihkan sumber daya dari aktivitas yang satu ke aktivitas lain guna menghasilkan produk dan pelayanan yang baru dan berbeda, menanggapi permintaan masyarakat.
5. Kepuasan ditujukan pada perasaan masyarakat terhadap pekerjaan mereka dan peran di organisasi serta pertimbangan manfaat yang diterima partisipan, demikian pula oleh pelanggan dan masyarakat.

Selain itu, Gibson juga mengungkapkan tiga pendekatan mengenai kriteria efektivitas, yaitu :

1. Pendekatan Tujuan.

Pendekatan tujuan untuk mendefinisikan dan mengevaluasi efektivitas merupakan pendekatan

tertua dan paling luas digunakan. Menurut pendekatan ini, keberadaan organisasi dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pendekatan tujuan menekankan peranan sentral dari pencapaian tujuan sebagai kriteria untuk menilai efektivitas serta mempunyai pengaruh yang kuat atas pengembangan teori dan praktek manajemen dan perilaku organisasi, tetapi sulit memahami bagaimana melakukannya. Alternatif terhadap pendekatan tujuan ini adalah pendekatan teori sistem.

2. Pendekatan Teori Sistem.

Teori sistem menekankan pada pertahanan elemen dasar masukan-proses-pengeluaran dan mengadaptasi terhadap lingkungan yang lebih luas yang menopang organisasi. Teori ini menggambarkan hubungan organisasi terhadap sistem yang lebih besar, diman organisasi menjadi bagiannya.

3. Pendekatan *Multiple Constituency*.

Pendekatan *Multiple Constituency* merupakan pendekatan yang menggabungkan pendekatan tujuan dengan pendekatan sistem sehingga diperoleh satu pendekatan yang lebih tepat bagi tercapainya organisasi. Pendekatan ini adalah perspektif yang menekankan pentingnya hubungan relatif di antara kepentingan kelompok dan individual dalam hubungan relatif diantara kepentingan kelompok dan individual dalam suatu organisasi. Dengan pendekatan ini memungkinkan pentingnya hubungan relatif diantara kepentingan kelompok dan

individual dalam suatu organisasi. Dengan pendekatan ini memungkinkan mengkombinasikan tujuan dan pendekatan sistem guna memperoleh pendekatan yang lebih tepat bagi efektivitas organisasi.

Robbins (1994:54) juga mengungkapkan beberapa pendekatan dalam efektivitas organisasi:

1. Pendekatan pencapaian tujuan (*goal attainment approach*). Pendekatan ini memandang bahwa keefektifan organisasi dapat dilihat dari pencapaian tujuannya (*ends*) daripada caranya (*means*). Kriteria pendekatan yang populer digunakan adalah memaksimalkan laba, memenangkan persaingan dan lain sebagainya. Metode manajemen yang terkait dengan pendekatan ini dikenal dengan *Manajemen By Objectives* (MBO) yaitu falsafah manajemen yang menilai keefektifan organisasi dan anggotanya dengan cara menilai seberapa jauh mereka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
2. Pendekatan sistem. Pendekatan ini menekankan bahwa untuk meningkatkan kelangsungan hidup organisasi, maka perlu diperhatikan adalah sumber daya manusianya, mempertahankan diri secara internal dan memperbaiki struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi agar dapat berintegrasi dengan lingkungan yang darinya organisasi tersebut memerlukan dukungan terus menerus bagi kelangsungan hidupnya.
3. Pendekatan konstituensi-strategis. Pendekatan ini menekankan pada pemenuhan tuntutan konstituensi

itu di dalam lingkungan yang darinya orang tersebut memerlukan dukungan yang terus menerus bagi kelangsungan hidupnya.

4. Pendekatan nilai-nilai bersaing. Pendekatan ini mencoba mempersatukan ke tiga pendekatan diatas, masing-masing didasarkan atas suatu kelompok nilai. Masing-masing didasarkan atas suatu kelompok nilai. Masing-masing nilai selanjutnya lebih disukai berdasarkan daur hidup di mana organisasi itu berada.

Steers dalam Nuraeni (2008:23-24) mengatakan bahwa efektivitas adalah keseluruhan mengenai sejauh mana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapainya sasarannya. Dimana dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa adanya empat faktor utama yang dianggap ada hubungannya dengan efektivitas.

Faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Faktor Organisasi

Dimana struktur dan teknologi organisasi dapat mempengaruhi segi-segi tertentu bahwa meningkatkan spesialisasi fungsi, ukuran organisasi, sentralisasi pengambilan keputusan dan formalisasi teknologi juga dapat berakibat atas tingkat efektivitas walaupun mungkin tidak langsung.

2. Faktor Lingkungan

Keberhasilan hubungan organisasi lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal bergantung pada tiga hal, yaitu: tingkat keterdugaan, ketepatan resepsi terhadap keadaan

lingkungan, tingkat rasionalitas organisasi.

3. Faktor Pekerja

Kesadaran akan sifat pribadi yang terdapat diantara pekerja sangat penting artinya, karena pekerja yang berbeda membiarkan tanggapan dengan cara yang berbeda pula atas usaha-usaha manajemen untuk usaha yang diarahkan ketujuan dengan pengetahuan perbedaan ini maka manajemen dapat menyesuaikan rancangan mereka terhadap pengorganisasian dan kepemimpinan atas pekerja dalam pekerjaandan dengan demikian meningkatkan kesempatan berkerja sama, memperbesar dukungan bersama untuk sasaran organisasi.

4. Faktor Kebijakan dan Praktek manajemen

Ada beberapa mekanisme khusus alat para manajer meningkatkan efektivitas organisasi. Mekanisme ini meliputi tujuan strategi, pencarian dan pemanfaatan sumber daya, menciptakan lingkungan, prestasi proses komunikasi, kepemimpinan, dan pengembalian keputusan, adaptasi, dan inovasi organisasi.

Sofian Efendi dalam Sofyan (2010) menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan rendahnya kualitas pelayan publik di Indonesia, antara lain :

1. Konteks monopolistik, dalam hal ini karena tidak adanya kompetisi dari penyelenggara pelayanan publik non pemerintah, tidak ada dorongan kuat untuk meningkatkan jumlah, kualitas maupun pemerataan pelayanan tersebut oleh pemerintah.

2. Tekanan dari lingkungan, dimana faktor lingkungan amat mempengaruhi kinerja organisasi pelayanan dalam transaksi dan interaksinya antara lingkungan dan organisasi publik.
3. Budaya patrimonial, dimana budaya organisasi penyelenggara pelayanan publik di Indonesia masih banyak terikat oleh tradisi-tradisi politik dan budaya masyarakat setempat yang seringkali tidak kondusif dan melanggar peraturan-peraturan yang telah ditentukan.

Masalah efisiensi dan efektivitas organisasi, dijelaskan pula oleh **Gibson dalam Steers (1995: 37-41)** bahwa faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah bermula dari efektivitas individu yang dipengaruhi oleh kemampuan, keahlian, dan pengetahuan individu, latar belakang pendidikan formalnya. Memang tidak selamanya begitu, namun paling tidak berdasarkan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan keteknisannya akan mempengaruhi dalam cara bersikap, motivasi, yang akhirnya bila tidak dapat memenuhi tuntutan psikologis atau sesuai harapan, dapat menimbulkan stress.

METODE

Dalam menganalisa data yang penulis peroleh baik data primer maupun data sekunder, penulis mempergunakan Teknik Deskriptif yakni analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ditemukan dilapangan mengenai Pelaksanaan prinsip-prinsip penanganan gelandangan dan

pengemis pasca penertiban di kota Pekanbaru. Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka data informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan jenisnya dan dianalisa secara kualitatif yang disajikan dalam bentuk tabel dan uraian.

HASIL

1. Prinsip-prinsip penanganan gelandangan dan pengemis

Prinsip-prinsip dalam penanganan gelandangan dan pengemis yang tertuang dalam bab VII pasal 7 dalam UU no 12 tahun 2008 yang sebagai pedoman dinas sosial dan pemakaman kota Pekanbaru dalam menangani gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru, yaitu :

- a. Prinsip penerimaan gelandangan dan pengemis secara apa adanya.
Yaitu sikap dimana pihak yang dimaksudkan bertugas dalam hal penanganan gelandangan dan pengemis harus bisa bersikap menerima setiap kekurangan dan permasalahan masing-masing individu gelandangan dan pengemis.
- b. Prinsip tidak menghakimi (*non judgemental*) gelandangan dan pengemis.
Prinsip tidak menghakimi merupakan suatu sikap dimana pemerintah melalui Dinas Sosial dan Pemakaman serta masyarakat tidak boleh langsung memberi stigma negative terhadap individu

gelandangan dan pengemis tanpa mengetahui terlebih dahulu apa dan mengapa orang tersebut memilih dan terpaksa hidup di jalanan.

- c. Prinsip individualisme
Prinsip individualisme adalah dimana setiap gelandangan dan pengemis tidak disama ratakan begitu saja, tetapi harus dipahami secara khusus sesuai dengan keunikan pribadi dan masalah mereka masing-masing.
- d. Prinsip kerahasiaan
Prinsip kerahasiaan adalah dimana setiap informasi yang diperoleh dari gelandangan dan pengemis dapat dijaga kerahasiaannya sebaik mungkin, terkecuali digunakan untuk kepentingan pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis itu sendiri.
- e. Prinsip partisipasi
Prinsip partisipasi merupakan dimana gelandangan dan pengemis beserta orang-orang terdekat dengan dirinya diikut sertakan dan dapat berperan optimal dalam upaya pelayanan dan rehabilitasinya kembali kemasyarakat.
- f. Prinsip komunikasi
Prinsip komunikasi merupakan dimana kualitas dan intensitas komunikasi antar gelandangan dan pengemis dengan keluarga dan lingkungan sosialnya

dapat ditingkatkan seoptimal mungkin sehingga berdampak positif terhadap upaya rehabilitasi gelandangan dan pengemis.

- g. Prinsip kesadaran diri
Prinsip kesadaran diri yaitu dimana para pelaksana pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis secara sadar wajib menjaga kualitas hubungan profesionalnya dengan gelandangan dan pengemis, sehingga tidak jatuh dalam hubungan emosional yang menyulitkan dan menghambat keberhasilan pelayanan.

Prinsip-prinsip penanganan gelandangan dan pengemis di atas merupakan pedoman dalam penanganan gelandangan dan pengemis di kota Pekanbaru, yang terjadi di Pekanbaru saat ini adalah bahwa Dinas Sosial dan Pemakaman yang berkerjasama dengan Satpol PP Pekanbaru tidak memahami hal tersebut. Setiap Dinas Sosial dan Pemakaman yang berkerjasama dengan Satpol PP Pekanbaru selesai melakukan razia (penjaringan) terhadap gelandangan dan pengemis, gelandangan dan pengemis tersebut diperlakukan sama. Mereka dikumpulkan, didata, diberi pengarahan dan dilepas kembali.

Usaha tersebut tentu tidak mengubah keadaan. Penanganan yang lebih baik dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dapat berupa pemberian rehabilitasi, yakni berupa pemberian bimbingan mental, bimbingan kesehatan, serta bimbingan keagamaan. Setelah bimbingan tersebut dilakukan, baru

kemudian kepada setiap gelandangan dan pengemis dapat diberi pelatihan berupa pemberian keterampilan dasar, yang mana keterampilan tersebut akan dapat digunakan ketika mereka dilepas kembali ke tengah-tengah masyarakat normal.

Perda no 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial yang memuat ketujuh prinsip-prinsip penanganan gelandangan dan pengemis harus menjadi pedoman yang kuat bagi dinas sosial dan pemukiman kota pekanbaru ingin menyelesaikan permasalahan gelandangan dan pengemis yang ada di kota pekanbaru.

dalam pelaksanaan prinsip-prinsip penanganan gelandangan dan pengemis dinas social dan pemukiman kota pekanbaru dalam hal ini belum cukup efektif karena gelandangan dan pengemis yang dirazia hanya didata saja tidak cukup untuk mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. Malahan jumlahnya akan bertambah jika tidak dilakukan penanganan apa-apa. Untuk itu dinas social dan pemukiman kota pekanbaru berupaya untuk melaksanakan ketujuh prinsip-prinsip penanganan gelandangan dan pengemis pasca penertiban/ razia yang dilakukan untuk mengurangi jumlah gepeng di kota pekanbaru.

2. Program-program penanganan gelandangan dan pengemis

program yang diberikan oleh dinas social dan pemukiman kota pekanbaru kepada gepeng adalah antara lain program pemberian pelatihan keterampilan yang disos berikan ditempatkan dipanti rehabilitasi khusus untuk penyandang

masalah social seperti gepeng ini namun terkendala dengan tidak adanya panti rahabilitasi untuk melaksanakan program-program yang ada.

Untuk sementara ini dinas sosial dan pemukiman kota pekanbaru dalam rangka menurunkan jumlah PMKS di kota pekanbaru secara bertahap tahun 2014 ini bertekad agar program bantuan yang bersumber dari dana APBD kota pekanbaru akan tetap lebih ditingkatkan.

Dari program-program yang di sebutkan tersebut, dalam rangka penanganan terhadap penanganan masalah PMKS di kota pekanbaru akan dibangun panti rehabilitasi, penambahan saran dan prasarana serta peningkatan pengetahuan dan kemampuan para pekerja social yang ada. Dan pembuatan panti ini membutuhkan waktu yang cukup lama.

mengenai pembuatan panti yang memerlukan biaya yang sangat besar nampaknya dinas social dan pemukiman kota pekanbaru belum bisa secepatnya membuat panti karena dinas social sendiri mebutuhkan jangka waktu yang cukup lama di samping keterbatasan dana yang diberikan oleh pemerintah kota semakin memepersulit dinas social dan pemukiman kota pekanbaru dalam mempercepat pembuatan panti rehabilitasi.

3. Sarana dan prasarana penanganan gelandangan dan pengemis

Dalam hal menunjang pelaksanaan prinsip-prinsip penanganan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru tidak

lepas dari tersedianya sarana dan prasarana yang ada dalam hal ini terutama keberadaan panti rehabilitasi untuk para gelandangan dan pengemis, tersedianya panti rehabilitasi untuk gelandangan dan pengemis akan memudahkan dinas sosial dalam pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis ataupun penyandang masalah kesejahteraan (PMKS) lainnya, pembinaan akan berlanjut bagi gelandangan dan pengemis dalam mendapatkan keterampilan dengan tujuan agar gelandangan dan pengemis tidak kembali lagi menjadi gelandangan dan pengemis dan turn ke jalan-jalan.

Sebenarnya dalam pelaksanaan program penampungan ini, pihak dinas social masih menyayangkan beberapa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan ini, diantaranya belum tersedianya sarana dan porasarana dalam menunjang kegiatan program yang dilakukan dinas social untuk geandangan dan pengemis, serta biaya yang sangat minim utnuk menunjang kegiatan atau program yang dilakukan dinas social bahkan para gepeng yang sudah dibina walaupun hanya pembinaan secara rohani oleh dinas social masih aja ada gepeng kembali kejalan untuk meminta-minta. Hal ini tentunya masih sangat jauh untuk dapat menurunkan jumlah gepeng di kota pekanbaru secara signifikan.

4. Pengawasan hasil pembinaan gelandangan dan pengemis

Pelaksanaan prinsip-prinsip penanganan gelandangan dan pengemis tidak lepas dari pengawasan

pihak dinas sendiri dimana pengawasan yang dilakukan dalam bentuk memonitoring gelandangan dan pengemis yang telah dibina sebagai contoh program kewirausahaan, dalam program ini gelandangan dan pengemis yang ikut serta dalam program pembinaan ini akan diberikan bantuan modal usaha berupa barang contohnya gerobak untuk jualan.

Pengawasan dalam program wirausaha akan dilakukan monitoring dalm 3 bulan sekali, dan di lihat dalam 6 bulan sekali apakah usaha yang dilakukan berkembang atau tidak, jika usaha yang dijalankan berkembang atau masih lanjut maka akan dilakukan program pengembangan usaha, pengawasan yang dilakukan dinas sosial hanya terhadap pelaksanaan program wirausaha dan tidak kepada program lain, hal ini aka mneyebabkangelandangan dan pengemis yang mengikuti pembinaan tidak akan serius dan akan kembali lagi menjadi gelandngan dan pengemis walaupun setelah dibina karena menganggap pembinaan hanya formalitas.

pembinaan atau penanganan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru belum sesuai dengan prinsip-prinsip penanganan yang tertera di dalam perda no 12 tahun 2008 hal ini dapat kita lihat dari proses yang di jalankan oleh dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru pasaca penertiban yang hanya mengidentifikasi para gelandangan dan pengemis dan setelah itu di pulangkan, artinya penanganan yang dilakukan belum berdasarkan prinsip-

prinsip penanganan gelandangan dan pengemis.

PEMBAHASAN

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Penanganan Gelandangan dan Pengemis Pasca Penertiban di Kota Pekanbaru

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “apakah pembinaan gelandangan dan pengemis telah sesuai dengan prinsip-prinsip penanganan serta hal apa saja yang menjadi hambatan dinas social dan pemukiman kota pekanbaru dalam pelaksanaan prinsip-prinsip penanganan gelandangan dan pengemis” dan pembahasan yang dilakukan berdasarkan urutan indicator tersebut. Dalam mengumpulkan data melalui wawancara ini, peneliti menggunakan teknik purposive adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi social yang diteliti (sugiyono, 2008).

Program penanganan bagi penyandang masalah kesejahteraan social tujuannya adalah untuk mengentaskan penyandang masalah kesejahteraan social di kota pekanbaru agar terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan social para penyandang masalah social sehingga mereka dapat

melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Bila ditinjau dari program penanganan kesejahteraan social maka pemenuhan kebutuhan yang di upayakan adalah pemenuhan kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani dan kebutuhan social, ketentuan pemenuhan kebutuhan tersebut terdapat pada petunjuk teknis pelayanan kesejahteraan social yang diberikan oleh dinas social kepada masyarakat. Sedangkan penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) termasuk gelandangan dan pengemis dimana mereka adalah salah satu sasaran program ini.

Pelaksanaan prinsip-prinsip Penanganan gelandangan dan pengemis ini menjadi tanggung jawab pemerintah kota pekanbaru bersama-sama dan secara teknis fungsional hal tersebut menjadi salah satu tugas penting dinas social dan pemukiman kota pekanbaru, walaupun hal tersebut hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan, hal ini di tandai dengan meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. Dinas social beserta berbagai sub bagian yang terstruktur di dalamnya bekerja sama dan bersinergi melaksanakan berbagai kegiatan yang telah tersusun dalam suatu program atau kebijakan yang telah disusun untuk menangani masalah gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru.

Pelaksanaan prinsip-prinsip penanganan gelandangan dan penemis oleh dinas social dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis

ini sangat penting untuk menuntaskan penyandang masalah kesejahteraan social di kota pekanbaru, dinas social dan pemukiman kota pekanbaru dalam hal melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu salah satunya melaksanakan prinsip-prinsip penanganan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru dirasa belum cukup optimal sehingga hasil yang didapat kurang maksimal dikarenakan ada beberapa kendala atau hambatan yaitu belum tersedianya panti rehabilitasi untuk membina/menangani gelandangan dan pengemis.

Usaha-usaha untuk menangani gelandangan dan pengemis yang telah dilakukan oleh dinas social dan pemukiman kota pekanbaru sudah berjalan cukup baik, namun dalam pelaksanaan prinsip-prinsip penanganan gelandangan dan pengemis pastinya dinas social memiliki hambatan-hambatan yang akan mempersulit mereka, Sedangkan faktor penghambat proses pelaksanaan prinsip-prinsip penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) antara lain adalah sebagai berikut :

1. Tidak adanya tempat penampungan untuk pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru, hal ini yang menjadi salah satu masalah yang cukup serius dalam hal penanganan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru sehingga gepeng yang berhasil di razia hanya di data dan setelah itu di pulangkan embali kedaerah asal gepeng tersebut tanpa mendapatkan penanganan yang

seharusnya dan memungkinkan kembalinya gepeng kembali kejalan-jalan.

2. Minimnya dana dari pemerintah. Untuk menangani gelandangan dan pengemis yang jumlahnya sangat banyak tersebut diperlukan biaya yang cukup besar.
3. Pegawai dinas sosial yang tidak memiliki pemahaman dan bidang keahlian dalam melaksanakan prinsip-prinsip penanganan tersebut.
4. Tidak berjalannya perda no 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial di kota pekanbaru,

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yaitu penelitian tentang pelaksanaan prinsip-prinsip penanganan gelandangan dan pengemis pasca penertiban di kota pekanbaru, pada penelitian ini peneliti menggunakan teori dari Gibson, teori tersebut menjelaskan bahwa efektivitas organisasi dapat diukur dengan kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaiannya tujuan, proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, ketersediaan prasarana dan sarana, dan sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Dalam hal ini dapat di tarik kesimpulan yaitu dalam pelaksanaan prinsip-prinsip penanganan gelandangan dan pengemis dinas social dan pemukiman kota pekanbaru dalam hal ini belum cukup efektif dan penanganan yang dilakukan dinas sosial dan pemukiman kota pekanbaru

belum berdasarkan prinsip-prinsip penanganan karena gelandangan dan pengemis yang dirazia hanya didata saja tidak cukup untuk mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru yang seharusnya para gelandangan dan pengemis dibina atau diberi keterampilan di tempat rehabilitasi dengan tujuan agar gelandangan dan pengemis tidak kembali lagi ke jalan atau mengulangi pekerjaan yang sama jika tidak ada pembinaan keterampilan dan pengawasan yang bersifat continue maka akan menyebabkan jumlahnya akan bertambah jika tidak dilakukan penanganan apa-apa. Untuk itu dinas social dan pemakamna kota pekanbaru berupaya utnuk melaksanakan ketujuh prinsip-prinsip penanganan gelandangan dan pengemis pasca penertiban/ razia yang dilakukan untuk mengurangi jumlah gepeng di kota pekanbaru.

Tidak adanya panti rahbilitasi menyebabkan tidak berjalannya dengan maksimal program-program yang telah ada. Sarana dan prasaranadalam pelaksanaan program penampungan

ini, pihak dinas social masaih menyayangkan beberapa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan ini, diantaranya belum tersedianya sarana dan porasarana dalam menunjang kegiatan program yang dilakukan dinas social untuk geandangan dan pengemis, serta biaya yang sangat minim utnuk menunjang kegiatan atau program yang dilakukan dinas social bahkan para gepeng yang sudah dibina walaupun hanya pembinaan secara rohani oleh dinas social masih aja ada gepeng kembali kejalan untuk meminta-minta. Hal ini tentunya masih sangat jauh untuk dapat menurunkan jumlah gepeng di kota pekanbaru secara signifikan.pengawasan yang dilakukan dinas sosial hanya terhadap pelaksanaan program wirausaha dan tidak kepada program lain, hal ini aka mneyebabkan gelandangan dan pengemis yang mengikuti pembinaan tidak akan serius dan akan kembali lagi menjadi gelandngan dan pengemis walaupun setelah dibina karena menganggap pembinaan hanya formalitas.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Sosial RI. 2005. *Masalah-masalah Sosial di Indonesia*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial.

Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tunasusila Direktorat

Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI. 2007. *Standard Pelayanan Minimal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis*.

As'ari, Hasim. 2007. *Analisi Efektivitas Implementasi Kebijakan*

- Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kota Pekanbaru (Kasus di Kecamatan Tenayan Raya)*. Tesis. PISA. PPS. UNRI : Pekanbaru
- Direktorat Kesejahteraan Tuna Susila. 2008. *Pedoman Rehabilitasi Sosial Gelandangan*. Jakarta: Depsos RI
- Dwiyanto, Agus, 2006, *reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta:UGM
- Dwiyanto, Agus. 2005. *Kemiskinan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Pers
- Dye, Thomas. R. 1987. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall
- Huda, Miftahul. 2009. *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Isbandi, Rukminto adi. 2003. *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Fisip UI
- Junaidi. 2007. *Anak Jalanan Perempuan*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Keban, YT, 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep dan Teori*, Gaya Media Yogyakarta.
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 2009. *Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran*.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YPKN
- Nuraini, Lida Amelia. 2008. *Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Sibolga 2005 Provinsi Sumatera Utara*. Administrasi Negara. Pekanbaru.
- Tarmansyah. 2003. *Rehabilitasi dan Terapi untuk Individu yang Membutuhkan Layanan Khusus*. Depdiknas.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2005. *Masalah-masalah di Masyarakat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Sihombing, M. Jastin. 2005. *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marjinal*. Yogyakarta: Narasi
- Soetomo. 2008. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi, 2005, *Manajemen Publik*, Jakarta :PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Zakiah, Daradjat. 1990. *Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental*. Jakarta: Bulan Bintang
- Peraturan Perundang-undangan**
Undang-undang Dasar RI Pasal 34
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial